

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dan arus politik nasional, pasca amandemen keempat UUD 1945, memiliki energi yang cukup besar untuk mendorong terbukanya iklim politik yang lebih demokratis. Salah satu implementasinya adalah dengan disahkannya Rancangan UU (RUU) tentang pemerintahan daerah menjadi UU sebagai bentuk penyempurnaan UU otonomi daerah. Keluarnya UU No. 32 tahun 2004 ini telah menjadi dasar bagi pelaksanaan pilkada langsung, yang kemudian dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 sebagai penegasan dan perincian dari UU tersebut.

Juan J. Linz dan Alfred Stephan (1996) mengatakan masyarakat sipil (civil society) adalah salah satu arena utama dalam konsolidasi demokrasi setelah partai politik, birokrasi, *rule of law*, dan masyarakat ekonomi. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana masyarakat lokal mampu menumbuhkan iklim demokrasi dalam pilkada langsung. Sementara partisipasi politik masyarakat Indonesia selama ini masih berpola pada partisipasi politik mobilisasi yang kurang mencerminkan sikap rasional politik. Pada saat yang bersamaan, UU Nomor 32 Tahun 2004 masih memberikan dominasi pada parpol dalam penentuan calon yang bakal bertarung.

Primordialisme yang berlatar belakang kesukuan, ras, etnik, agama, kelompok, partai, fraksi, bahkan juga asal-usul seseorang sangat mempengaruhi dalam Pilkada langsung. Jika memang primordialisme itu positif sebagaimana yang

dikatakan oleh Franz Magnis Suseno, yakni seseorang menolong walaupun karena ikatan primodialisme, tetapi kalau dia memang benar-benar mampu masih bisa ditolehir.

Pendapat Juan J. Linz dan Alfred Stephan (1996) partai politik adalah salah satu arena utama dalam konsolidasi demokrasi modern. Studi Linz dan Stephan tentang partai politik adalah sebagai pilar demokrasi memang tidak salah. Masalahnya adalah apakah rasionalisme parpol akan tercipta dalam hal rekrutmen politik telah teruji secara benar. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas tentang calon yang akan dimajukan sebagai pejabat publik akan bertarung mendapatkan suara rakyat secara permanen dalam pasar bebas demokrasi melalui pilkada langsung?

Kemudian timbul pertanyaan, apakah mekanisme baru dalam Pilkada ini akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, bisakah diharapkan adanya perubahan dan kemajuan peradaban, perbaikan nasib rakyat, perbaikan pola penyelenggaraan negara di daerah pada momentum tersebut. Ataukah ini hanya momentum atau sandiwara politik yang menghiasi pelegalisasian kekuatan lama yang produksi-status quo, dan yang membuat rakyat terjebak dalam buaian "ketoprak humor" politik.

Dari uraian tersebut menjadi dasar latar belakang penulis mencoba melaksanakan penelitian tentang pemilihan Kepala Daerah langsung khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat.

1.1.1. Permasalahan

Sejak beberapa bulan terakhir, aktifitas dan suhu politik semakin meningkat di Kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi ini berkaitan karena digelarnya pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung) untuk memilih orang nomor satu di Kabupaten Pakpak Bharat, yang sudah satu setengah tahun dijabat oleh pejabat Bupati. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya setiap daerah diberikan wewenang sepenuhnya untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Mengingat Kabupaten Pakpak Bharat sebagai sebuah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Dairi banyak mengalami kendala dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Suatu daerah yang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang masih tertidur dan belum ada yang mampu untuk membangunkannya, bahkan hingga berakhirnya masa tugas pejabat Bupati.

Dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Pakpak Bharat para Balon Bupati Pilkadasung mulai melakukan upaya-upaya dan mencari lobi-lobi kendaraan politik yang mau ditunjangi. Beberapa calon kontestan sudah mulai melakukan curi start kampanye keluar masuk dari satu desa ke desa lain. Adapula yang pasang promosi lewat kalender, media massa maupun alasan silaturahmi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mengumbar janji muluk, dan sejenisnya mulai terdengar dari tim sukses yang berkeliaran di lapangan. Tak segan-segan memakai atribut PNS dan berbagai fasilitas negara yang mumpung masih dapat digunakan. Lomba pasang spanduk, adu panjang, adu tinggi dan adu kata-kata manis. Alam gaib kembali mendapat tempat mengadu bagi beberapa calon kontestan yang nampaknya

kurang memiliki iman yang kuat, boleh jadi ingin menghalalkan segala cara untuk menang. Segala daya dan upaya dilakukan namun dinamika politik masyarakat masih sulit untuk ditebak, banyak dari balon yang mengklaim bahwasanya desa A telah menjadi basis pendukungnya, rakyat memang pintar cari posisi aman, setiap balon yang "mendekat" diterima dengan sopan dan bijaksana. Kalau ada transaksi gelap dimanfaatkan, cuma sekali dalam lima tahun ada pemberian orang-orang berduit itupun karena ada maunya. Tapi hati nurani tidak bisa dibeli, apalagi ditukar secara materi atau system barter PNS bila berhasil pada hari-H pemilihan.

Fenomena diatas adalah sebuah proses pembelajaran demokrasi kepada rakyat Pakpak Bharat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana melibatkan rakyat dalam wacana politik demokrasi yang benar sehingga muncul generasi politikus yang lebih dewasa di masyarakat yang kritis dan berani dalam menegakkan kebenaran. Aktifitas politik seperti ini dapat dijadikan sebagai momen kebangkitan demokrasi dikalangan bawah sebagai ujung tombak penegakan demokrasi secara khusus di Pakpak Bharat dan umumnya di seluruh Indonesia. Kebenaran tetap di tangan rakyat sebagai pemegang kunci untuk membuka hati nurani menentukan pilihan. Namun semua itu dipengaruhi oleh faktor kepentingan masing-masing untuk memilih siapa yang diunggulkan. Seburuk apapun si calon pasti akan memiliki pendukung masing-masing.

Dari uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam pilkada langsung Kabupaten Pakpak Bharat yaitu :

- Masalah dukung mendukung berbagai komunitas masyarakat Pakpak Bharat seperti kelompok etnis, kelompok marga, kelompok agama, lembaga sosial

dan kemasyarakatan, kelompok ormas, ornop, yang dapat menjurus kearah konflik internal, horizontal, dan vertikal.

- Peranan partai politik dalam menjaring bakal calon yang rawan politik uang, pengaruh elit politik dalam menentukan calon, calon yang diajukan oleh partai politik sebagai pemilik kendaraan, apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan pengaruh primordialisme dan kapitalisme dalam penentuan dan pemenangan calon.
 - Upaya dan strategi apakah yang dilakukan oleh pasangan calon agar bisa menang dalam kompetisi.
 - Faktor-faktor manakah yang mempengaruhi calon menjadi menang atau kalah
- Pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Pakpak Bharat apakah berlangsung dengan demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang demokratis.

1.1.2. Batasan Masalah

Karena kompleksnya permasalahan pilkada langsung di Kabupaten Pakpak Bharat, maka permasalahan dibatasi pada:

- Upaya dan strategi yang diperbuat oleh pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Fokus permasalahan kepada sikap, perbuatan, strategi calon dan tim suksesnya untuk mempengaruhi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan calon menang atau kalah dalam pilkada langsung di Kabupaten Pakpak Bharat.

1.3. Tinjauan Teoritis

Acuan teoritis dalam mengkaji perumusan penelitian ini mengacu pada Antropologi Politik yang ada hubungannya dalam pemilihan Kepala Daerah Langsung. Tinjauan teoritis dapat diuraikan sebagai berikut.

Menurut pendapat Budiardjo teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. (Budiardjo.M. 2000 : 8).

1.3.1. Konsep Politik

Menurut Budiardjo teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas : (a) tujuan dari kegiatan politik, (b) cara-cara mencapai tujuan itu, (c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu, (d) Kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep diatas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya. (Budiardjo.M. 2000 : 31).

1.3.2. Konsep Masyarakat

Perumusan Harold J. Jaski dari *London School Of Economics and Political Science* mengenai masyarakat adalah “ sekelompok manusia hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama” (*Society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants*). Dari defenisi ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah. (Dalam Budiardjo.M. 2000 : 34).

1.3.3. Konsep Pengaruh

Menurut Hoogerwel pengaruh terjadi apabila tingkah laku menjurus kepada perubahan-perubahan tingkah laku. Pengaruh politik terjadi apabila tingkah laku menjurus kepada pengubahan kebijaksanaan pemerintah atau kepada terwujudnya dan dampaknya. Sering istilah-istilah kekuasaan dan pengaruh dianggap secara keliru sebagai muradif atau sinonim. Kekuasaan adalah pengaruh yang kuat, yaitu sesuai dengan tujuan-tujuan sang aktor. (Hoogerwel, 1979 : 159).

1.3.4. Konsep Wewenang

Wewenang (“authority”) amenurut Lipset adalah kekuasaan atau kepemimpinan yang sah yang diakui sebagai yang benar. Keabsahannya adalah istilah yang agak gelap. Lipset mengatakan umpamanya “*Legitimacy involves the capacity of the system to engender and maintain the belief that the existing political institution*

are the most appropriate ones for the society” (Seymour Martin Lipset, Political Man, 1990, halaman 77).

1.3.5. Konsep Demokrasi

Schumpeter berpendapat bahwa tingkat demokrasi yang sama dapat dicapai dengan bermacam-macam cara. Gudang sarana untuk memungkinkan anggota-anggota kelompok mempengaruhi kebijaksanaan pada dasarnya tidak terbatas. Pemilihan-pemilihan merupakan hanya satu dari sarana-sarana itu. Sarana-sarana lain meliputi umpamanya peraturan mayoritas, tetapi juga peraturan untuk melindungi minoritas-minoritas, keterbukaan, kebebasan mengemukakan pendapat, naik banding terhadap keputusan-keputusan aktivitas-aktivitas politik melalui kelompok-kelompok penekan dan badan-badan pertimbangan, dan jaminan kebebasan pribadi yang secara berat sebelah dibatasi hanya pada pemilihan-pemilihan adalah umpamanya definisi terkenal dari Schumpeter. Metoda demokrasi adalah peraturan kelembagaan untuk tiba pada pembentukan keputusan dimana perseorangan-perseorangan memperoleh hak mengambil keputusan melalui perang persaingan suara para warga” (Joseph A. Schumpeter, *capitalism, socialism and democratic*, 1963, halaman 229. terjemahan dari *capitalism, socialism and democracy*, 1943).

1.3.6. Konsep Dukungan

Dukungan itu menurut pendapat yang terkenal dari Easton, dapat ditunjukkan kepada masyarakat politik (dengan singkat, keseluruhan anggota dari sistem politik). Rezim politik (asas-asas dan norma-norma politik) yang berlaku dan pengemban-

pengembangan kekuasaan politik. Dukungan dapat juga ditujukan kepada kebijaksanaan. (Hoogerwel, 1979 : 197).

Juga cara pemimpin-pemimpin politik mendapatkan dukungan politik dari para warga, dapat berbeda-beda, dari berbagai bentuk bujukan hingga paksaan dan kekerasan. (Hoogerwel, 1979 : 197)

1.3.7. Mobilisasi Politik

Cameron berpendapat bahwa dalam literatur mobilisasi politik kebanyakan dilihat sebagai akibat dari suatu proses perubahan sosial seperti modernisasi, dan jurang-jurang pemisah dalam masyarakat. Sebaliknya Cameron mengemukakan pembenaran anggapan bahwa mobilisasi politik untuk bagian besar adalah sarana yang digunakan atas pertimbangan yang matang untuk tujuan-tujuan tertentu. Mobilisasi politik menurut Cameron untuk bagian besar tergantung dari tiga faktor: pertama kebijaksanaan dari golongan-golongan pelaksanaan mobilisasi yang aktif dibidang politik dan khususnya tingkatan usaha golongan-golongan ini menyesuaikan ideologi dan organisasi mereka kepada kebutuhan setempat; kedua sampai dimana golongan-golongan tertentu mewujudkan kebijaksanaan itu mempunyai posisi sebagai orang luar; ketiga bukan jurang-jurang pemisah sosial sendiri, tetapi bagaimana jurang-jurang pemisah itu dialihkan menjadi jurang pemisah politik. (David R. Cameron, Toward a Theory of Political Mobilization, dalam : The Journal of Politics, vol.36 No. 1 Februari 1974, halaman 138-171).

1.3.8. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa *Partai Politik* adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiardjo.M, 2000 : 160).

1.3.9. Elite Politik

Varma mengemukakan mulanya "Teori elit politik" lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonomi), Lasswell (Ilmuwan politik) dan sosiolog C.Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels(seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose Ortega Y. Gasset (Spanyol). Pareto (1848-1923) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari pengacara, mekanik, bajingan atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Karena

itu menurut Pareto masyarakat terdiri dari dua kelas : (1) Lapisan atas yaitu elit, yang terbagi dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite), (2) Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. (dalam S.P. Varma, 2001: 199).

1.3.10. Kampanye dan Propaganda

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “*Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu*”. Merujuk pada definisi ini maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) jumlah khalayak sasaran yang besar (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. (Dalam Rahmat, 2004:7).

Menurut Rahmat antara kampanye dengan propaganda ada kemiripan. Bedanya, istilah propaganda telah dikenal lebih dulu dan memiliki konotasi yang negatif, sementara istilah kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun terakhir serta memiliki citra positif dan akademis. Tetapi kehadiran konsep kampanye bukanlah pengganti kata propaganda yang mulai dijauhi orang sejak perang dunia kedua. Kedua konsep tersebut secara akademis memang benar-benar berbeda. Setidaknya ada tujuh perbedaan mendasar antara kampanye dengan propaganda. *Pertama*, sumber kampanye selalu dapat diidentifikasi secara jelas. Nama lembaga yang menjadi penyelenggara kampanye (*campaign makers*) biasanya

tercantum atau disebutkan dalam berbagai saluran komunikasi yang digunakan. Sebaliknya sumber propaganda cenderung menyembunyikan identitas mereka. Dalam istilah populernya, kampanye lebih suka 'terang-terangan' dalam melakukan aktivitas mereka, sementara propaganda lebih senang 'sembunyi-sembunyi'. Perbedaan yang *kedua* terkait dengan batasan waktu. Dalam hal ini kampanye senantiasa dilakukan dalam periode waktu tertentu. Kapan dan berapa lama sebuah program kampanye akan dilakukan selalu dinyatakan dengan jelas. Sementara propaganda tidak terikat oleh batasan waktu. *Ketiga*, sifat gagasan-gagasan kampanye terbuka untuk diperdebatkan sedangkan propaganda menganggap gagasan-gagasan mereka mutlak benar atau sudah *self-evident*. *Keempat*, tujuan kampanye selalu jelas dan spesifik. Bahkan sebagian besar program kampanye memiliki tujuan yang dapat diukur dengan mudah. Tujuan kampanye juga sangat bervariasi bergantung pada jenisnya. Sementara tujuan propaganda diarahkan untuk mengubah *belief system* dari khalayak dan tujuan tersebut tidak pernah dinyatakan dengan jelas. Karena sifatnya yang demikian maka dokumen-dokumen kegiatan propaganda sulit untuk ditemukan. Perbedaan *kelima* berkaitan dengan modus penerimaan pesan. Dalam hal ini kampanye berbeda dengan propaganda. Kampanye sangat menekankan kesukarelaan dan menghindari pendekatan koersif, sementara propaganda tidak mementingkan kesukarelaan dan menghalalkan cara paksaan. Perbedaan *keenam* berkenaan dengan modus tindakan di mana dalam kampanye ada kode etik yang mengatur cara dilakukannya kegiatan, sedangkan dalam propaganda aturan semacam itu tidak pernah dikenal. *Terakhir*, dalam kampanye kepentingan kedua belah pihak perlu diperhatikan agar tujuan dapat dicapai, sementara propaganda hanya menimbang

kepentingan sepihak dari propagandis. Ketujuh perbedaan ini sudah cukup menjadi pegangan dalam mengidentifikasi apakah suatu tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi khalayak termasuk dalam kategori kampanye atau propaganda.

(Rahmat, 2004 : 5).

1.3.11. Konsep Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, konsep kebudayaan dalam arti yang terbatas (sempit) ialah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Dengan singkat kebudayaan adalah kesenian. Konsep kebudayaan dalam arti luas yaitu seluruh total dari pikiran, karya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sambil proses belajar.

Kemudian menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan yang universal, merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini adalah: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian, dan (7) sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2002:2)

1.3.12. Kelompok Etnik

Dalam buku Narroll, 1964, umumnya kelompok etnik dikenal sebagai sesuatu populasi yang :

1. Secara biologis mampu berkembangbiak dan bertahan
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk kebudayaan.

3. Bentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri
4. Menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. (Fredrik Barth, 1969 : 11).

1.3.13. Konsep Konflik

Daniel Webster mendefinikan konflik sebagai berikut :

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (Misalnya: Pertentangan pendapat, kepentingan atau pertentangan antara individu).
3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan.
4. Perseteruan.

Pickering berpendapat bahwa pada dasarnya, konflik terjadi bila dalam satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik tidak harus berarti berseteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi konflik. (Dalam Peg Pickering, 2000 : 1)

Rumsel mengemukakan, bahwa tingkah laku dalam rangka konflik politik dalam negeri dimana ia antara lain mengingat kepada kerusuhan, unjuk rasa, pembersihan, pembunuhan dan pemberontakan menunjukkan perbedaan-perbedaan menurut tiga matra (dimensi), yaitu huru hara ("turmoil"), revolusi dan subversi. Tingkah laku politik dalam negeri menurut Rummel tidak menunjukkan pertalian

yang erat dengan perkembangan ekonomi, berbagai ciri system politik (yaitu poliarki, komunisme, monarki dan kebalikan-kebalikannya), kepadatan penduduk, atau tingkah laku politik luar negeri (R.J. Rumsel, 1971).

Perbedaan antara oposisi (atau persaingan) dan konflik menurut Hoogerwel dapat menjadi jelas apabila kita membayangkan bagaimana suatu pertandingan sepakbola berubah menjadi konflik. Selama tujuan utama dari setiap regu adalah untuk mencapai kemenangan maka hanya terjadi persaingan. Akan tetapi apabila tujuan utama dari suatu regu atau seseorang adalah menghalangi regu lawannya memperoleh kemenangan dengan permainan curang maka terjadilah konflik. (Hoogerwel, 1979 : 229).

1.4. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini penulis berusaha mencari buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan topik penelitian ini, terutama yang berhubungan dengan otonomi daerah dalam pemilihan kepala Daerah langsung.

Kajian kepustakaan ini dimaksudkan untuk membantu penulis dalam membahas fokus penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang detail secara ilmiah.

Ada beberapa buku dan tulisan tentang pemilihan kepala daerah langsung pada era otonomi daerah yang dikemukakan dalam tulisan ini antara lain oleh : Prihatmoko dalam bukunya Pemilihan Kepala Daerah Langsung, bahwa kualitas kompetisi dalam pilkada sesungguhnya dapat dilihat dari sistem pencalonan atau pendaftaran calon yang digunakan. Pencalonan juga merupakan satu dimensi hak

pilih aktif, yakni hak warga untuk dipilih. Dimensi lainnya adalah hak warga untuk memilih. Karena itulah, pencalonan merupakan tahapan penting yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya oleh para politisi, dalam pilkada langsung. Suatu pencalonan disebut kompetitif apabila secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan calon-calon atau kelompok tertentu atas alasan-alasan politik. Artinya, ketentuan perundang-undangan harus memberikan akses yang sama besar bagi warga yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun bukanlah suatu yang tidak benar apabila diatur mengenai persyaratan calon karena kedudukan dan fungsi kepala daerah menuntut kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang memadai. Selama ini dikenal dengan 2 jenis sistem pencalonan dalam pilkada langsung, yaitu (1) Sistem pencalonan terbatas dan sistem pencalonan terbuka. (Prihatmoko, 2005 : 234).

Daniel S. Salossa mengkaji tentang *pilkada langsung*. Kasus yang dibahas tentang studinya berkaitan dengan mekanisme, persyaratan dan tata cara pemilihan langsung menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Diantaranya mengenai kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban (pasal 27):

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintah yang bersih dan baik
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintah daerah dihadapan rapat paripurna DPRD (2004:31)

Dalam pergeseran kekuasaan pemerintah Daerah menurut konstitusi Indonesia oleh Sayuti Una, M.H (2004), pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit, hanyalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh kepala Daerah saja (2004:8)

Dari beberapa studi diatas diperoleh gambaran bahwa Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada era otonomi daerah khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat ada beberapa Buku atau tulisan yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan implementasi, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Pakpak Bharat, upaya dan strategi yang dilaksanakan oleh pasangan calon, dan factor-faktor yang mempengaruhi kemenangan dan kekalahan pasangan calon.

Menurut Sudarman Darwin, penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya bersifat penunjang. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai tata situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyusunan hasil penelitian (Sudarwan Darwin, 2002: 61)

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian digunakan metode studi pustaka, survey, observasi, wawancara, kuesioner terhadap subjek dan objek yang ada hubungannya dalam penelitian ini.

1.5.1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pakpak Bharat, merupakan Kabupaten baru di Propinsi Sumatera Utara, hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi. Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung bersamaan dengan 14 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2005.

Penelitian direncanakan pada bulan Mei tahun 2005 sampai dengan Februari 2006 (± 9 bulan).

Tabel 1 Rancangan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	BLN I	BLN II	BLN III	BLN IV	BLN V	BLN VI	BLN VII	BLN VIII	BLN IX
1.	Survei awal, Studi Pustaka dan konsultasi	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Pengajuan proposal	*								
3.	Seminar Proposal		*							
4.	Pelaksanaan Penelitian		*	*	*	*	*	*	*	
5.	Analisis Data				*	*	*	*	*	
6.	Penulisan Laporan Tesis				*	*	*	*	*	
7.	Seminar Tesis				*	*	*	*	*	
8.	Ujian dan perbaikan									*

1.5.2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan berbagai tehnik, prinsip umumnya agar data dapat diterima dan selanjutnya dapat diuji sehingga diperoleh data yang signifikan. Tehnik ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari berbagai literatur selengkap mungkin, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Literatur yang sudah ada, dibaca berulang-ulang hingga dapat dipahami berkorelasi dengan substansi yang dibahas. Dengan studi pustaka ini dapat membantu penulis mengarahkan sasaran pembahasan hasil penelitian. Literatur yang tersedia dapat berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen seperti Undang-Undang, makalah hasil seminar dan lain sebagainya. Jadi studi pustaka dilakukan untuk menemukan data sebagai landasan teoritis dalam menganalisa hasil penelitian.

b. Survei

Metode survei dilakukan untuk menemukan dan melengkapi data-data yang terkumpul, termasuk dengan studi pengalaman penulis sendiri (*experience survey*), survey terhadap obyek/sasaran dan tokoh masyarakat yang dianggap berperan dalam proses Pilkadausung, sebab, biasanya seorang tokoh dapat memiliki kriteria tertentu oleh warganya dan menjadi orang yang dianggap mampu mengaktualisasikan simbol identitas kelompoknya. Survei ini merupakan studi awal dari studi berikutnya, karena itu secara umum dapat memberikan gambaran untuk langkah pengumpulan data berikutnya. Tehnik yang dilakukan dengan memilih pihak-pihak yang tertentu secara acak untuk dimintai informasi baik yang sudah dipilih sebagai informan, maupun kemungkinan ditemukan secara tiba-tiba. Jadi survei merupakan kegiatan penelitian terhadap objek dan informan tertentu untuk diteliti lebih detail dengan tehnik penelitian yang lain sehingga menghasilkan validitas data.

c. Observasi

Teknik observasi melalui pengamatan, baik secara langsung (observasi partisipasi) maupun tidak terlihat didalam peristiwa atau kegiatan yang diamati. Observasi ditujukan kepada calon dan berbagai aktifitas kelompok masyarakat baik yang dilakukan secara kelompok maupun secara individu, seperti kegiatan marga, keagamaan, parpol, KPUD, Tim sukses dan lain sebagainya, dalam rangka Pilkada Langsung. Berdasarkan aktifitas tersebut, khususnya yang terkait dengan kajian penelitian ini, maka semua data hasil observasi dilukiskan secara tepat seperti apa yang dilihat. Observasi ini tidak terbatas pada visual (penglihatan) saja, tetapi juga melalui pengalaman yang lain, seperti pendengaran, penciuman dan perabaan tentang kegiatan masyarakat tersebut.

Adapun sasaran observasi ini antara lain mengamati berbagai karakteristik kelompok-kelompok yang ada, misalnya rapat-rapat/ pertemuan kampanye dan sebagainya. Pengamatan dapat juga dilakukan dengan memakai alat bantu seperti tape recorder dan kamera photo. Dengan demikian, observasi dilakukan untuk menemukan data-data yang dapat dipantau secara inderawi dan alat bantu lainnya yang sesuai.

d. Wawancara

Kegiatan tanya jawab yang dilakukan bersifat tidak berstruktur, artinya wawancara bebas, misalnya ketika bertemu dengan seorang informan dalam berbagai kesempatan, jika memungkinkan langsung berbicara sambil bertanya. Teknik ini memungkinkan data diperoleh lebih natural, apa adanya. Dengan kata lain wawancara dilakukan tanpa memaksa informan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan,

melainkan strategi adaptasi bertanya yang terkait dengan keterampilan tertentu harus dilakukan.

Wawancara tidak juga ditujukan kepada satu kelompok tertentu dan tidak bersifat formal. Karena tujuannya adalah mengetahui apresiasi individu masing-masing terhadap calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pelaksanaan Pilkada Langsung dan kesadaran individu terhadap identitas kelompoknya. Tidak tertutup kemungkinan juga wawancara dilakukan, berulang kali terhadap individu tertentu. Prinsip ini dilakukan untuk mendalami keterangan tertentu yang dibutuhkan secara rinci, karena itu satu permasalahan dimungkinkan membutuhkan beberapa kali pengajuan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang sejelas-jelasnya.

e. Angket

Tujuan utama pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, dimana informasi tersebut mempunyai nilai *reliability* dan *validity*.

Kuesioner disusun dengan pertanyaan tentang fakta, persepsi/pendapat, informasi yang diketahui tentang pilkadasung dari pasangan calon.

Kuesioner disampaikan kepada responden terpilih, setelah diisi dikembalikan kembali pada penulis.

f. Informan Penelitian

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah mewakili komitmen masyarakat, baik yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan

kepala daerah langsung, maupun yang tidak langsung dilibatkan. Informan antara lain, tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, pemuda dan pemudi, termasuk juga anggota masyarakat, parpol, dan tim sukses calon kepala daerah/wakil kepala daerah, masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang berasal dari Kabupaten Pakpak Bharat maupun dari luar kabupaten. Penentuan informan dilakukan secara acak, yaitu memilih seseorang berdasarkan peranan dan pengaruhnya dalam masyarakat setempat, kemudian mempertimbangkan identitas kelompoknya secara seimbang atau paling tidak mewakili kelompok lain.

g. Kepercayaan Data.

Untuk membuktikan dan meyakini kebenaran data bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengecekan data (*cross check*) dengan memakai metode yang berbeda pada masalah yang sama, misalnya men-cek data hasil informan melalui wawancara, lalu dikomparasikan dengan hasil observasi. Kemudian mengembalikan hasil wawancara kepada informan untuk diperbaiki apabila terdapat kesalahan (*re check*), dapat juga bertanya kembali untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh, tetapi kemungkinan belum valid.

Selanjutnya melakukan *triangulasi*, yaitu dengan membandingkan informasi atau data yang sama dari informan yang berbeda. Bisa juga dilakukan penyesuaian data yang sama dari sumber yang berbeda. Jadi data yang diperoleh dari informan yang berlainan dimungkinkan kembali melakukan koreksi data melalui penyesuaian

data sehingga menghasilkan data yang bermakna sama atau bermaksud sama untuk menghindari duplikasi makna data.

1.5.3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni data kualitatif yang terkumpul melalui studi pustaka, survei, observasi, kuesioner, dan wawancara langsung dideskripsikan secara bertahap kedalam bentuk tulisan, kemudian diklasifikasikan secara tabulatif sesuai isi atau kecenderungan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan berlangsung hingga tahap pengolahan dan analisis data.

Setelah data-data dibaca, dipelajari dan ditelaah, lalu diadakan reduksi data dengan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman, yang selanjutnya disusun ke dalam satuan-satuan tertentu sesuai karakteristik atau substansi masing-masing data. Dari proses ini juga dilakukan pembuatan kategori-kategori data, sekaligus pembuatan koding untuk memudahkan penafsiran data. Melalui proses ini juga dilakukan koreksi data, baik terhadap kekurangan dan kesalahan data, maupun penyempurnaan data melalui berbagai cara pengujian data sehingga kepercayaan data dalam penelitian ini mempunyai validitas yang tinggi.

Tahap akhir dari proses analisis data ialah mengadakan interpretasi data, yaitu menafsirkan data. Untuk memperoleh data yang valid dan signifikan terhadap teori dan konsep dengan peneftian ini, maka penafsiran data selalu diorientasikan agar berkorelasi dengan landasan teori, termasuk dalam hal metodologi dan prosedur yang

dipakai dalam penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana aktualisasi komunitas masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

1.5.4. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian seperti diuraikan terdahulu, dapat dijabarkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini atau penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan pokok yaitu:

1. Bagaimana implementasi prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat ?
2. Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan pasangan calon kepala daerah, dalam pilkadasung di Kabupaten Pakpak Bharat ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan dan kekalahan pasangan calon kepala daerah dalam pilkadasung di Kabupaten Pakpak Bharat ?

1.6. **Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Memberikan gambaran tentang implementasi, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pilkadasung di Kabupaten Pakpak Bharat, upaya dan strategi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan atau kekalahan pasangan calon.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan ketentuan dan peraturan yang berhubungan dengan

pelaksanaan pilkadasung dan menjadi bahan perbandingan dengan kabupaten lain yang telah melaksanakan pilkadasung.

3. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyelenggara, para calon dan tim sukses dalam pelaksanaan pilkadasung, untuk dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan.

1.7. Kerangka Berfikir

Kabupaten Pakpak Bharat, merupakan kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara, hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi. Kabupaten Pakpak Bharat dihuni oleh masyarakat yang mayoritas dari etnis Pakpak.

Sesuai dengan ketentuan, bahwa pada bulan Juni 2005 dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dalam rangka pelaksanaan Pilkada tersebut, telah dilaksanakan tahap-tahap kegiatan diantaranya penjurangan bakal calon oleh Partai Politik. Partai Politik mendaftarkan calon untuk dipilih oleh rakyat dalam Pilkada langsung.

Calon yang sudah ditetapkan, akan berupaya dengan berbagai strategi untuk dapat menang dan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Upaya-upaya apakah dan faktor-faktor manakah yang diperbuat oleh calon untuk mempengaruhi masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan dan kekalahan pasangan calon kepala daerah, serta bagaimana implementasi proses dan mekanisme pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Pakpak Bharat. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Skema 1.1 Kerangka Berfikir Teoritis

